

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan. Oleh karena, konsep pembangunan desa harus menyentuh pada kebutuhan masyarakat desa. Dengan kata lain, agar kebutuhan masyarakat desa dapat terwujud maka perencanaan harus dirumuskan melalui Mesrabangdes sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan melalui sistem perwakilan. Dengan demikian maka partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan desa dengan mudah dilaksanakan.

Selama ini, pembangunan desa bergerak dari atas ke bawah atau yang lazim disebut dengan top down, dimana sistem ini sudah dinyalakan gagal mewujudkan partisipasi masyarakat dan terkesan pembangunan itu bukan untuk kepentingan masyarakat desa tapi lebih kepada kepentingan pengusaha yang mencari keuntungan diri sendiri. ¹Pembangunan seperti ini cenderung tidak mendatangkan bermanfaat kepada masyarakat. Perlu dipahami bahwa pembangunan dengan tidak dilibatkan masyarakat maka sudah pasti partisipasi masyarakat tidak akan diperoleh dan program seperti ini tidak akan berjalan seperti yang direncanakan.

Tapi sebaliknya, bila program itu dirancang dari musyawarah masyarakat maka program itu pasti mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat pula. Kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian, serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.

¹ Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Humaniora.

Pengertian partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan intrinsik maupun ekstrinsik dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan.²

Menurut Slamet (1985) Ada tiga unsur pokok yang menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi,
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya unsur kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, pada umumnya berkaitan dengan kemauan politik (political will) pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan.³

Diungkapkan oleh Dusseldorp (1981), bahwa kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Partisipasi Spontan. Peran-serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik, berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri.
2. Partisipasi Terinduksi. Peran-serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik, berupa bujukan, pengaruh, dan dorongan dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
3. Partisipasi Tertekan oleh Kebiasaan, Peran-serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan seperti yang dirasakan masyarakat pada umumnya. Atau peran-serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai atau

² Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.

³ Febianti, F. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sumedang Selatan. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 4(2), 41-51.

norma yang dianut oleh masyarakat. Jika tidak berperan-serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

4. Partisipasi Tertekan oleh Alasan Sosial-Ekonomi. Peran-serta yang dilakukan masyarakat, karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian dengan tidak memperoleh bagian dari manfaat hasil kegiatan pembangunan.
5. Partisipasi Tertekan oleh Peraturan. Peran-serta yang dilakukan masyarakat, karena takut menerima hukuman dari peraturan atau ketentuan yang diberlakukan.⁴

Secara umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dikarenakan masyarakat hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberikan input, tanpa mengetahui dengan jelas tentang manfaat yang akan diperoleh dan dirasakan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Selain itu, masyarakat tidak atau kurang informasi yang jelas tentang kesempatan yang disediakan untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Dengan demikian, pemberian kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, harus dilandasi pemahaman bahwa masyarakat layak diberi kesempatan, karena memiliki kemampuan yang diperlukan, dan masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun guna perbaikan kualitas. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian, serta tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.⁵ Dari keterangan sebagai mana disebut di atas saya tertarik untuk meneliti dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DESA (STUDI DESA KEDAI DURIAN KECAMATAN DELITUA KABUPATEN DELISERDANG)**

⁴ Putra, D. P., Jeddawi, M., & Masrich, A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bangkit Berdaya di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 186-195.

⁵ Rani, S. (2016). Strategi Komunikasi dalam Pembangunan Desa Berbasis Partisipatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(29).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang di paparkan , maka perumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pembangunan Ekonomi Desa di Desa Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pelebaran pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah agar peneliti lebih jelas dan terarah. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang: Partisipasi Masyarakat Pada Bidang Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Desa Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang), yang di fokuskan pada partisipasi Masyarakat pada bidang Pembangunan Ekonomi Desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat pada penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Desa Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)?

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis Berharap Penelitian ini akan bermanfaat untuk :

1) Secara Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk tambahan refrensi, dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian terdahulu maupun penelitian yang akan datang.

2) Secara Praktis

a. Bagi lembaga

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, bahan evaluasi maupun bahan pertimbangan untuk menyusun Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pembangunan Ekonomi Desa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi maupun referensi untuk memperluas wawasan karena dengan Partisipasi Masyarakat maka dapat membantu Desa menjalankan pembangunan ekonomi.

c. Bagi Penulis

Sebagai bahan Informasi untuk menambah Ilmu Pengetahuan dan memperluas pola pikir terkait Partisipasi masyarakat pada pembangunan ekonomi desa.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Penelitian

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian (kualitatif) adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Adapun teori-teori yang mendasari penelitian ini adalah:

2.1.1 Partisipasi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi berarti ada keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan.⁶ Berikut beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu:

- 1) Menurut Wazir (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama⁷.
- 2) Partisipasi masyarakat menurut Adi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁸

⁶ <http://repository.umpr.ac.id/241/3/BAB%20II.pdf>

⁷ Wanimbo, E., Tumengkol, S., & Tumiwa, J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Memutuskan Mata Rantai Pandemi Covid-19 di Kelurahan Tingkuluh Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal ilmiah society*, 1(1).

⁸ Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 380-394.

- 3) Soekanto (1983: 245) menegaskan bahwa partisipasi adalah pinjaman dari bahasa Belanda “participatie”, yang sebenarnya dari bahasa latin “participatio”. Perkataan “participatio” terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “part” yang berarti bagian, dan “capere” yang berarti mengambil bagian. Selanjutnya, kata “participation” itu sendiri berasal dari kata kerja “participate” yang berarti ikut serta. Jadi, partisipasi mengandung pengertian aktif yakni adanya kegiatan atau aktivitas. Pengertian partisipasi menurut asal usul kata sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto dapat dipahami bahwa partisipasi merupakan suatu aktivitas untuk mengambil bagian atau peran dalam suatu kegiatan bersama.⁹
- 4) Tjokrowinoto (1993: 48) menegaskan bahwa partisipasi secara aktif dalam pembangunan di lingkungan masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan bahkan sudah menjadi mitos dari pembangunan itu sendiri, sehingga hampir semua negara mengumumkan secara luas kebutuhan partisipasi dalam semua proses pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memberikan kontribusi kepada kegiatan bersama dengan maksud dan tujuan untuk mencapai tujuan kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan dalam berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan kreatifitas yang ada dalam pola pikir dan mata hati mereka, yang akan disampaikan dalam musyawarah desa (disebut juga “Rapat Desa”).¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian partisipasi masyarakat seperti yang telah diungkapkan maka penulis berpendapat bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan kontribusi aktif secara fisik dan mental dalam berbagai kegiatan bersama, sebagai realisasi akan hak dan kewajiban setiap warga Negara dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, setiap berbicara partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari:

⁹ Wahyuningsi, W. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Doctoral Dissertation, Politeknik Stia Lan Makassar).

¹⁰ Khuluq, L. (2014). PERLINDUNGAN PEREMPUAN: PERSPEKTIF KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN. *dan Praktek Pekerjaan Sosial*, 65.

- 1) Ada keterlibatan dan kontribusi aktif
- 2) Secara fisik dan mental
- 3) Dalam kegiatan bersama
- 4) Menunaikan hak dan kewajiban
- 5) Mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Dwiningrum (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
- 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

- 4) Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.¹¹

Dari definisi partisipasi di atas yang telah dikemukakan di atas, maka dalam rencana penulisan penelitian ini peneliti menggunakan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Dwiningrum (2011: 61-63) yaitu: Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi dalam evaluasi. Dengan digunakannya teori ini peneliti tentu berharap dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan ekonomi desa yang terjadi di Desa Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deliserdang.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Masyarakat Menurut Basrowi (Dwiningrum, 2019:58-59) partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Partisipasi secara fisik. Dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan membangun gedung untuk masyarakat atau juga dalam bentuk bantuan yang lain.
2. Partisipasi non fisik. Merupakan partisipasi yang melibatkan menempuh pendidikan nasional dan meratanya wawasan dan keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu melalui pendidikan.

Mubyanto dalam Ndraha (2020:102-104) dalam partisipasi masyarakat tentunya ada berbagai bentuk partisipasi di dalamnya yaitu :

1. Partisipasi dilakukan dengan cara berkontak langsung antar individu
2. sebagai bentuk awal dari kegiatan sosial di masyarakat.
3. Partisipasi mampu untuk menyerap maupun menerima informasi baik menerima ataupun menolak informasi yang diterima.

¹¹ Sunaryo, U. P. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 8(2).

4. Bertujuan dalam ikut serta andil dalam pengambilan keputusan perencanaan maupun pengambilan keputusan.
5. Partisipasi bergerak dengan melukakan konsep pelaksanaan pembangunan.

Davis dalam jurnal yang ditulis Antonius Ibori (2020:4) bahwa partisipasi masyarakat terbagi juga dalam beberapa bentuk , yaitu :

1. Partisipasi dalam bentuk pikiran.
2. Partisipasi dalam bentuk tenaga.
3. Partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga.
4. Partisipasi dalam bentuk keahlian.
5. Partisipasi dalam bentuk barang.
6. Partisipasi dalam bentuk uang

2.1.3 Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

Menurut Maskun dalam Mulyadi (2019:101) partisipasi masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Merupakan kepentingan dan minat masyarakat.
3. Sesuai dengan adat istiadat masyarakat.
4. Sifatnya mengikat anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.

Adapun faktor pendukung partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh (Khairudin, 2019:126) bahwa partisipasi yang didapat didalam masyarakat dapat dilihat dari segi motivasinya, paksaan dari atasannya, hanya karena mengukuti anggota masyarakat lain sebagai rasa solidaritas, dan kesadaran diri sendiri.

2.1.4 Faktor penghambat partisipasi masyarakat

Pada kegiatan yang diselenggarakan di tengah masyarakat terkait partisipasi masyarakat tentunya ada saja faktor yang menjadi penghambat.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006:135) yaitu :

1. Sikap masa bodoh, apatis, dan juga sikap malas. Selain itu tidak adanya keinginan untuk mengubah keadaan tersebut

2. Adanya makna-makna tipologi. Merupakan ciri fisik dari suatu wilayah, kedalaman, ketinggian, luas wilayah atau bisa dikatakan sebagai suatu kondisi dari suatu wilayah tertentu
3. Dipengaruhi oleh letak geografisnya
4. Jumlah penduduk
5. Keadaan ekonomi desa tersebut.

Disamping itu, (Slamet, 2018:89) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah partisipasi masyarakat yaitu, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencarian.

2.1.5 Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi masyarakat adalah: Sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan yang dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa yang bersangkutan. Antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri.

Menurut Adisasmita (2006: 34) mengemukakan bahwa : Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat besar terkait dengan pembangunan. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka program yang dilakukan akan sesuai dengan kegiatan perencanaan.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program/proyek di masyarakat.

Partisipasi masyarakat mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan yang kebijakannya bersifat top-down, partisipasi masyarakat dalam kebijakankebijakan yang di buat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan, namun pada sistem pemerintahan yang bottom-up, tingginya partisipasi masyarakat dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

Adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan di upayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Dengan penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan tercapai secara optimal pula.

2.1.6 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet (Suryono 2001: 124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai: “ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan”.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama.

Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Bratakusumah (2005: 16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat. Administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan (belum tentu dengan cara-cara langsung) kegiatan masyarakat luas, sesuai dengan arah kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan.

Menurut Tjikroamidjojo (1995: 224) ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- 1) Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menemukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- 2) Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahan mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
- 4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

2.1.7 Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan sarana instrumental untuk menetapkan, memantapkan, dan melaksanakan tujuan nasional dalam pembangunan negara (Atmosoedirdjo, 1991).¹²

¹² Dadang Solihin, S. E. (2021). *Administrasi Pembangunan*. Jakad Media Publishing.

Sondang P. Siagian (1983) Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.¹³

Bintoro Tjokroamidjojo (1997) Administrasi Pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif serta mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan.

Ginandjar Kartasmita (1997) Administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini berarti bahwa dalam studi dan praktik administrasi pembangunan diperlukan adanya perhatian dan komitmen terhadap nilai-nilai yang mendasari dan perlu diwujudkan menjadi dasar etika birokrasi.

Berdasarkan beberapa pengertian Administrasi pembangunan seperti yang telah diungkapkan maka penulis berpendapat bahwa Administrasi pembangunan adalah sarana instrumental yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk melaksanakan usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (nation-building). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

¹³ Setiawan, F. (2019). Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 1-11.

Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa. Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4).

Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling

terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Menacapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan. Dapat dipahami bahwa proses pembangunan dapat diupayakan kearah yang positif serta lebih maju dari sebelumnya.

Dalam membangun tentunya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha-usaha secara sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan kerjasama semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal dengan administrasi pembangunan.

Siagian (2009:5) mendefinisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan kehidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Mostopadidjaya dalam afiffudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Afiffudin (2010:64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, meghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki cirri-ciri yang membedakan dengan disiplin Ilmu-ilmu yang lain yaitu :

- a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik
- b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Jika dimasukkan administrasi pembangunan dalam konteks idea menurut Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan.

Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang di maksud adalah kepala desa.

Kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu mengemban amanah untuk memperbaiki keadaan desa dengan berbagai program yang sifatnya membangun. Menurut kartono (2006:325) administrator pembangunan bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata. Administrator pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Suharto (2006:7) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistendalam pencapaian tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat berupa program- program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program- program pelayanan yang efektif.

2.1.8 Pengertian Desa

Pengertian Desa Menurut Beberapa Sumber : Menurut undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1;

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014;

Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki atas wilayah untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahan setempat yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Dimana sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung/dusun/banjar/jorong.

¹⁴ Nisa, S. W., & Setiawati, B. (2022). Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 5(1), 215-228.

Selain itu terdapat Tipologi Desa seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Tentang Desa pada Bab 1 Pasal 1 yaitu :

Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). Tipologi Desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Mandiri berdasarkan Permendesa No. 16 Tahun 2018, yaitu :

1. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
2. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
3. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
5. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2.1.9 Pembangunan Ekonomi

Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), (2) meningkatnya rasa harga diri (selfesteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia,

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.¹⁵

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut:

1. suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu;
2. usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
3. peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang;
4. perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu aspek perbaikan di bidang aturan main (rule of the games), baik aturan formal maupun informal; dan organisasi (players) yang mengimplementasikan aturan main tersebut.

¹⁵ Arsyad, L. (2017). Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. *Tersedia secara online di: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf> [diakses di Lembang, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].*

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan topik penelitian ini meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam lokasi yang menjadi tempat penelitian dilaksanakan, namun penelitian terdahulu ini diharapkan mampu menjelaskan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wahyuningsih (2019)	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa gareccing kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat desa gareccing dalam menghadiri rapat musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang rutin diselenggarakan setahun sekali.
2	Maringan panjaitan , Evi Phaninora pandiangan (2022)	Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di desa bandar klippa , kecamatan percut sei tuan, kabupaten deli serdang.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di desa bandar klippa sudah dikatakan cukup baik dan antusias masyarakat yang ikut dalam proses pengambilan keputusan yang dimana masyarakat ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan.
3	A'an , sri maryani dan agus eka (2022)	Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa sekura, kecamatan teluk	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam diskusi musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dalam musrenbangdes tidak optimal, dikarenakan sedikitnya

		keramat kabupaten sambas.		masyarakat yang hadir dan partisipasi masyarakat dalam kehadiran rapat musyawarah pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dapat dikatakan sangat rendah.
4	Arli Gideon Sinaga (2023)	Analisis partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa Di desa tanjung Morawa Kecamatan tanjung Morawa	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum dikatakan baik dan ada juga kendala saat menghadiri rapat karena masyarakat masih banyak yang bekerja, dan mempunyai kesibukan lain.
5	Hendryk (2019)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda	Kualitatif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam pembangunan, dan ada juga beberapa faktor bahwa partisipasi masyarakat dikatakan sangat rendah, karena kurangnya antusias masyarakat yang ikut dalam proses pembangunan, dan masyarakat ada yang tidak hadir dalam menghadiri rapat . Hal ini tersebut menjadi perhatian peneliti dalam melakukan penelitian untuk menjawab mengapa hal tersebut menjadi penghambat dalam melakukan pembangunan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka Berfikir ialah konsep yang dibuat dalam mendeskripsikan penelitian dengan cara yang sederhana. Dengan Menghubungkan korelasi antar permasalahan serta teori yang telah diidentifikasi sebelumnya. Untuk menilai partisipasi masyarakat, perlu adanya musyawarah masyarakat desa.

Oleh karena itu, teori Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Dwiningrum (2011: 61-63) yaitu: Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi dalam evaluasi. Dengan digunakannya teori ini peneliti tentu berharap dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan ekonomi desa yang terjadi di Desa Kedai Durian Kecamatan Delitua Kabupaten Deliserdang, dengan demikian terlebih dahulu peneliti dapat mengamati secara detail baik dengan observasi dan wawancara

